BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dikelurahan maulafa tahun 2022-2024 ,dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku .seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran,pelaksanaan ,telah dilaksanakan secara sistematis. Proses perencanaan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat, RT/RW, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan, sehingga usulan pembangunan yang disusun benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan yang baik antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran, sehingga seluruh proses berjalan secara terpadu dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan mampu mendukung pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan sistem ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan, koordinasi yang baik antara Kelurahan Maulafa dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kota,

kompetensi aparatur yang memadai, serta komitmen seluruh pihak dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses Musrenbang turut mendukung penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu di Kelurahan Maulafa telah terlaksana dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan yang menghambat proses pelaksanaannya secara signifikan. Sistem yang diterapkan mampu menciptakan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas sistem perencanaan dan penganggaran terpadu ke depan, Kelurahan Maulafa perlu terus mempertahankan kualitas koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta mempertahankan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, keselarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat terus terjaga sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan Maulafa menjadi semakin efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5.2 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat kelurahan.

Penelitian ini memperkuat konsep bahwa keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan seluruh perangkat organisasi dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat kelurahan.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi terapan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Bagi Kelurahan Maulafa

   Perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penguatan koordinasi internal antarperangkat kelurahan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Bagi Pemerintah Kota Kupang

   Perlu memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pendampingan teknis dalam pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu.

3. Bagi Perangkat Kelurahan

   Perlu meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan administrasi, perencanaan program, dan penyusunan anggaran agar pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi lebih optimal.

4. Bagi Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan

   Perlu meningkatkan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

5. Bagi Penelitian

   Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan kajian mengenai implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat pemerintahan daerah dengan menggunakan variabel, metode, atau periode penelitian yang lebih luas.